

PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA TERHADAP TINGKAT PELAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR UPBU KELAS III LARAT

Untung¹, Entang Adhy Muhtar², Tehubijuluw Zacharias³

Universitas Terbuka, Ambon, Indonesia ¹²³

e-mail : alumnibontot@gmail.com¹, entang.am0405@gmail.com², tehubijuluwtjak@yahoo.co.id³

Abstract

This research aims to determine the influence of administration and supervision of State Property on the level of financial reporting at the Larat Airport Organizing Unit Office. The type of research used is quantitative research. The research results prove that: (1) financial administration has a positive and significant effect on the level of financial reporting; (2) financial supervision has a positive and significant effect on the level of financial reporting; (3) financial administration and supervision together have a positive and significant influence on the level of financial reporting. It is hoped that further research can add other variables that influence the level of financial reporting, such as human resources, or expand the scope of research to a higher level than UPBU.

Keywords: State Owned Assets, Administration, Supervision, Level of Financial Reporting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan pengawasan Barang Milik Negara terhadap tingkat pelaporan keuangan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil riset membuktikan bahwa: (1) penatausahaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pelaporan keuangan; (2) pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pelaporan keuangan; (3) penatausahaan dan pengawasan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pelaporan keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat pelaporan keuangan seperti sumber daya manusia, ataupun memperluas cakupan penelitian yang levelnya lebih tinggi dari UPBU.

Kata Kunci : Penatausahaan, Pengawasan, Tingkat Pelaporan Keuangan, Barang Milik Negara.

A. PENDAHULUAN

Di zaman reformasi, disetiap negara pastinya menginginkan pemerintah yang bersih dan dikatakan *Good Governance*, termasuk di Indonesia. Dengan berjalannya otonom didaerah, menggambarkan tahapan hidup pada Reformasi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Daerah, yaitu dari otonomi Daerah. Peraturan No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menginisiasi pembaharuan unit keuangan, oleh tumbuhnya peraturan itu, mengharuskan penata Keuangan Negara secara baik, praktis dan bertepatan guna, tercapai, pasti dan bisa dipertanggung jawabkan, dan memperhatikan keadilan. Meninjau sejahtera, adab bisa diterapkan (Indrawati, 2019).

Sebagai bagian dari penyediaan pelayanan dasar publik, BMN sering digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana. Pemanfaatan BMN dalam penyediaan infrastruktur, termasuk angkutan massal, jalan-jalan dan jembatan, mata air dan irigasi persawahan, air dikonsumsi,

kotoran, telekomunikasi dan informasi, PLN, TPA, migas (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016).

Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Kemenkumham, 2017), pengelolaan BMN tidak dikelola secara ampuh dan berdayaguna. Salah satu permasalahan pengelolaan aset di daerah adalah penataan aset milik negara yang posisi hukum tidak pasti atau dalam konflik (BPPK Kemenkeu, 2015). Kantor UPBU Larat merupakan unit penyelenggara bandar udara yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, unit eselon I dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Fungsi dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat itu sendiri adalah menyelenggarakan konektivitas transportasi udara perintis khususnya di wilayah Indonesia yang masuk dalam kawasan daerah 3 T yang terletak di Kecamatan Tanimbar Utara.

Dengan adanya bandara Larat diharapkan mampu membawa kemajuan dari segala aspek buntut mengembangkan wilayah Indonesia bagian timur yang masih tertinggal dengan wilayah lainnya. Pada beberapa tahun terakhir pada Kantor UPBU Larat ada kesalahan akun dalam penyusunan rencana kertas kerja yakni akun 52111 yang seharusnya memakai akun 521811 dan pencatatan aset yang masih belum sesuai dengan regulasi penatausahaan barang milik negara.

Adapun UPBU larat saat ini masih mempunyai beberapa kekurangan di dalamnya. Penatausahaan aset pada kantor UPBU Larat pada kondisi saat ini masih belum tertata dengan baik. Selain itu, Pengawasan Barang Milik Negara Pada Kantor UPBU Larat dalam bentuk pemantauan, penertiban, dan investigasi. Dengan meminta penjelasan pengelola barang atas hasil pemantauan dan investigasi.

Fenomena yang terjadi di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat pada penatausahaan, masih terdapat kesalahan penganggaran berupa akun yang kurang sesuai dalam proses pengadaan barang milik negara. Penatausahaan dalam wujud pengkodean benda selaku bagian dari pengelolaan BMN, harus dikoordinir secara handal, sehingga nanti hendak menciptakan informasi yang pas serta akurat.

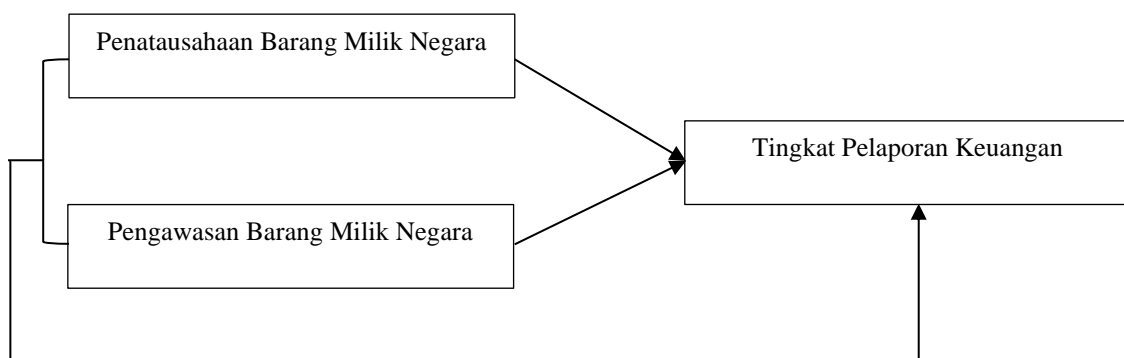
Pemanfaatan dari barang milik negara itu sendiri tidak sesuai dengan fungsinya. Spesifikasi teknis perolehan barang milik negara yang masih di bawah kerangka acuan kerja pengadaan. Laporan hasil pengecekan laporan keuangan tahun anggaran 3 tahun terakhir memperoleh opini normal dengan pengecualian, serta salah satu pengecualiannya merupakan pengelolaan aset tetap. Tidak hanya pengelola benda belum mempunyai keahlian atas tata metode penindakan benda tidak ada, penyusutan aset wilayah dan kode- kode dalam inventarisir benda.

Febrianti (2016), menjelaskan variabel administrasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Pemkab Kubu Raya. Sholehah (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemkab Barito Kuala. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah adanya variabel monitoring yang digunakan Mawuntu et al. (2020) telah dilaksanakan dan menunjukkan bahwa pengawasan tersebut tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pemkab Minah Utara karena tidak adanya ASN pada posisi pembuat dan penyaji laporan Keuangan dengan pengetahuan akuntansi dan pengawasan oleh auditor eksternal sangat tidak efektif atau rutin.

Adanya aturan perundangan yang menerapkan tolak ukur akuntansi pemerintahan berbasis akrual (termasuk penerapan BMN) sejak tahun 2015 telah berdampak penting terhadap tahap kemampuan petugas didalam mengelola BMN beserta menerapkan peraturan-peraturan dan standard baru. Penilaian manajemen BMN sangat jarang. Allini et al., (2014) menunjukkan bahwa

kemampuan petugas didalam organisasi yang sehat bisa meningkatkan pengelola BMN. Ekayanti et al. (2018) merangkum kemampuan petugas mempengaruhi hal baik terhadap pengelola BMD, begitu juga Gunawan et al. (2017). Tetapi, Azhar et al. (2013) menemukan bahwa kapasitas instansi di daerah tidak berdampak pada pengelola aset di Daerah. Selagi ini, Puspitarini et al. (2017) menghasilkan kemampuan petugas berpengaruh kepada penerapan *accrual accounting* dari BMN. Kompetensi petugas juga memiliki efek terhadap penerapan akuntansi akrual BMD (Firmansyah et al., 2020). Adanya inkonsistensi atas penelitian terdahulu menyebabkan perlunya dilakukan kembali uji kemampuan petugas didalam pengelola BMN bisa menggunakan data penelitian yang lain-lain.

Berdasarkan pembahasan atau penjelasan masalah diatas tersebut, maka judul didalam penelitiannya adalah “Pengaruh Penatausahaan Dan Pengawasan Barang Milik Negara Terhadap Tingkat Pelaporan Keuangan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat” dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penatausahaan didefinisikan sebagai rangkaian pelaksanaan yang meliputi pelaporan, inventarisasi, dan akuntansi BMD (Pemendagri No. 19/2016). Sebab seluruh Kebijakan lebih terukur dan tepat sasaran jika ditegakkan berdasarkan data yang benar yang diperoleh selama kegiatan pengelolaan aset, maka penatausahaan memiliki tempat yang sangat penting dalam manajemen aset. Penelitian Tamara (2018) memberikan dukungan terhadap gagasan bahwa penatausahaan aset tetap dapat memberi dampak yang bagus dan penting atas *finansial report quality*. Sehingga Hipotesisnya:

H1 : Penatausahaan BMN berpengaruh atas Tingkat Pelaporan Keuangan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat.

Prosedur monitoring dan tata cara Pemda diuraikan dalam Pasal 16 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, dan pengawasan terhadap status penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan sebagai rangkaian kegiatan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang benar dan patuh memastikan pengendalian keuangan dilaksanakan dengan berdasarkan perencanaan dan memiliki output berkualitasnya laporan keuangan. Penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat luas akan menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Haza, 2015). Kajian Asiah (2019) memberikan bukti atas pernyataan tersebut, menghasilkan monitoring keuangan daerah signifikan terhadap pelaporan keuangan yang berkualitas.

H2 : Pengawasan BMN berpengaruh atas Tingkat Pelaporan Keuangan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat.

Permendagri No 19 Tahun 2016 mendefinisikan penatausahaan aset sebagai pelaksanaan yang meliputi akuntansi, pelaporan, dan manajemen inventarisasi. Di sisi lain, Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 terkait protokol pengawasan atas penyelenggaraan pemda menjadi dasar pengawasan keuangan daerah. Penelitian Asiah (2019) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan penelitian Tamara (2018) menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada tingkat yang lebih rendah.

H3 : Secara simultan Penatausahaan BMN dan Pengawasan BMN berpengaruh terhadap Tingkat Pelaporan Keuangan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat.

B. METODE

Metode di dalam penelitiannya memanfaatkan deskriptif verifikatif melalui pendekatan kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat dan Saumlaki pada tahun 2020-2022, jumlah populasi dalam penelitian ini 30 pegawai PNS dan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu 30 orang. Pengumpulan data didapat melalui dilakukannya wawancara, mengisi kuisioner, observasi dan gabungan. Metode analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Uji Validitas, dan Pengujian Hipotesis.

C. HASIL PENELITIAN

1. Hasil

a) Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji Reliabilitas dan Validitas yang ada digunakan 30 responden yang merupakan karyawan UPBU Larat. Atas semua poin pertanyaan mempunyai value koefisien korelasi 0,3. Hal tersebut membuat validitas dan reliabilitas terjawab.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk variabel bebas (X1) Penatausahaan adalah 1522 atau dalam persentase adalah 85.33% dari skor ideal 1800, skor tersebut berada pada interval antara 1512 dan 1800 yakni termasuk pada kategori sangat baik. Skor total untuk variabel bebas (X2) Pengawasan adalah 1158 atau dalam persentase adalah 85.77% dari skor ideal 1350, skor tersebut berada pada interval antara 1134 dan 1350 yakni termasuk pada kategori sangat baik. Kemudian, skor total untuk Variabel Terikat (Y) Pelaporan adalah 1518 atau dalam persentase adalah 84.33% dari skor ideal 1800, skor tersebut berada pada interval antara 1512 dan 1800 yakni termasuk pada kategori sangat baik.

b) Uji Asumsi Regresi Linier Berganda

1) Hasil Uji F

Berdasarkan tabel 1 maka $\text{sig } 0.000 < \text{nilai } \alpha (0.05)$, sehingga disimpulkan Penatausahaan (X1) dan Pengawasan (X2) bersama-sama memberikan pengaruh atas Tingkat Pelaporan Keuangan (Y).

Tabel 1. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2721.137	2	1360.569	22.681	.000 ^b
	Residual	1619.663	27	59.988		
	Total	4340.800	29			
a. Dependent Variable: Tingkat Pelaporan Keuangan (Y)						
b. Predictors: (Constant), Pengawasan (X2), Penatausahaan (X1)						

2) Uji Signifikansi Model Secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda diperoleh Persamaan regresi sebagai berikut $Y = 10.057 + 0.394 X1 + 2.044 X2 + e$

Tabel 2. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.928	10.754		.923	.364
	Penatausahaan (X1)	.394	.184	.322	2.139	.042
	Pengawasan (X2)	2.053	.562	.550	3.656	.001
a. Dependent Variable: Tingkat Pelaporan Keuangan (Y)						

3) Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menghasilkan value gabungan semua rumus Adjusted R Square yaitu 0,627 / 62.7%. Karena itulah, Tingkat Pelaporan Keuangan (Y) berhasil dideskripsikan dari Penatausahaan (X1) dan Pengawasan (X2) sebesar 62.7%, dan lainnya sebesar 37.3% dipengaruhi faktor lain selain Variabel Penatausahaan (X1) dan Pengawasan (X2).

Tabel 3. Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.792 ^a	.627	.599	7.74516
a. Predictors: (Constant), Pengawasan (X2), Penatausahaan (X1)				

c) Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Asumsi Linieritas

Nilai Sig Linearitas seluruhnya sebesar 0,000, sesuai dengan temuan uji linearitas. Jika nilai uji Sig Linearitas lebih kecil dari taraf signifikansi (0,05) seperti terlihat pada tabel keluaran, maka asumsi linearitas terpenuhi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat linier.

2) Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas sisa Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp.Sig sebesar 0,200. Tabel keluaran menunjukkan bahwa nilai uji Asymp.Sig lebih besar dari nilai α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa residu model regresi mengikuti distribusi normal.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel tidak signifikan dengan nilai p-value > nilai α (0,05).

Menelaah Anggapan Multikolinearitas

Setiap orang dapat melihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki VIF (Variance Inflation Factor) lebih dari 10 dan tidak ada nilai toleransi yang lebih rendah dari 0,10 karena hal ini. Oleh karena itu, variabel independen tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas.

d) Temuan dari Pengujian Hipotesis

Temuan pengujian hipotesis dilaporkan di bawah ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan pendekatan Analisis Regresi Berganda:

Hipotesis 1 diterima bahwa besaran pelaporan keuangan (Y) dipengaruhi secara parsial oleh administrasi (X1). Anda dapat membayar di Kantor Unit Penyelenggara di Bandara Larat.

Pengawasan (X2) diyakini berpengaruh secara parsial terhadap jumlah pelaporan keuangan (Y).

Hipotesis 3 diterima, yang menyatakan bahwa Tingkat Pelaporan Keuangan (Y) dipengaruhi oleh Administrasi (X1) dan Pengawasan (X2).

D. PEMBAHASAN

Koefisien regresi sebesar 0,394 dan tingkat signifikansi sebesar 0,042 ditemukan ketika menguji pengaruh Tata Usaha (X1) terhadap Tingkat Pelaporan Keuangan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa Administrasi (X1) memang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pelaporan Keuangan (Y). Terdapat korelasi positif antara kedua variabel karena koefisien regresinya positif. Akibatnya, tingkat pelaporan keuangan (Y) yang lebih tinggi akan disebabkan oleh tingkat administrasi yang lebih tinggi (X1), dan sebaliknya. Baik penelitian ini maupun penelitian Abidin (2021) dan Aimbu et al. (2017) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh penatausahaan aset tetap. Berdasarkan temuan penelitian ini, laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dan menguntungkan dari pemerintah. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Refina (2019), Nurpadi & Hermawati (2021), Dewi et al. (2023), dan Poae et al. (2017) semuanya menunjukkan bahwa evaluasi, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian BMN secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan. kualitas laporan. Berbeda dengan Aimbu et al. (2017), yang tidak menemukan bukti bahwa pelaksanaan BMN—termasuk administrasi—memengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan, temuan penelitian ini menguatkan temuan tersebut.

Koefisien regresi sebesar 2,053 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 ditemukan ketika menguji pengaruh Pengawasan (X2) terhadap Tingkat Pelaporan Keuangan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan (X2) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap Tingkat Pelaporan Keuangan (Y). Terdapat korelasi positif antara kedua variabel karena koefisien regresinya positif. Akibatnya, semakin tinggi tingkat pelaporan keuangan (Y) dikaitkan dengan semakin tinggi tingkat pengawasan (X2), begitu pula sebaliknya. Hal ini memberikan kepercayaan pada asumsi filosofis yang mendasari teori atribusi, yang menyatakan bahwa, sesuai aturan undang-undang, tindakan pemimpin atau individu yang terkena dampak dipengaruhi oleh kualitas sebab-akibat (Fitri et al., 2016). Pelaporan keuangan yang lebih baik akan menghasilkan pengelolaan aset dan barang daerah yang lebih efektif (Poae et al., 2017). Penelitian Hidayati et al. (2016) yang menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian BMN berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan memberikan kredibilitas pada temuan Anshari dan Syofyan (2016).

Nilai p sebesar 0,000 dihasilkan oleh uji model ketika nilai probabilitas dalam Uji F dipertimbangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan (X1) dan Pengawasan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pelaporan Keuangan (Y) secara simultan yang ditunjukkan dengan nilai $\text{sig } 0,000 < \alpha (0,05)$ pada tabel. Temuan penelitian ini menguatkan temuan Aryani & Gani (2023) yang menemukan bahwa laporan keuangan pemerintah kota Palembang dipengaruhi oleh gabungan variabel penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, sejalan dengan temuan Sholikhah dkk. (2016) yang menemukan bahwa laporan kualitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali sebagian atau seluruhnya dipengaruhi oleh variabel independen pengawasan intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa relevansi yang mungkin dapat diidentifikasi dari tema penelitian ini dengan jurnal administrasi perkantoran dan kesekretariatan antara lain pertama, penelitian ini membahas tentang penatausahaan dan pengawasan barang milik negara, yang melibatkan proses pengelolaan administrasi di kantor UPBU. Meskipun berfokus pada barang milik negara, konsep pengelolaan administrasi ini dapat terkait dengan topik-topik yang dibahas dalam administrasi perkantoran dan kesekretariatan, terutama terkait dengan proses administratif yang melibatkan manajemen dokumen, pencatatan, dan tata kelola data. Kedua, penelitian ini mungkin mencakup prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk memastikan pengelolaan barang milik negara yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi terkait. Konsep ini bisa terkait dengan penekanan pada prosedur administrasi dan kepatuhan yang seringkali menjadi perhatian utama dalam jurnal administrasi perkantoran dan kesekretariatan. Ketiga, penelitian ini juga menyoroti tingkat pelaporan keuangan, yang dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi informasi keuangan. Aspek ini relevan dengan jurnal administrasi perkantoran dan kesekretariatan karena pelaporan dan komunikasi informasi sering menjadi fokus penting dalam manajemen administrasi kantor. Meskipun tidak secara langsung terkait, tetapi dengan mempertimbangkan relevansi aspek-aspek tersebut, penelitian tersebut masih dapat memberikan wawasan yang berguna atau perspektif tambahan terkait dengan administrasi perkantoran dan kesekretariatan.

E. Kesimpulan

Terdapat pengaruh signifikan antara Penatausahaan (X1) terhadap Tingkat Pelaporan Keuangan (Y). Ketersediaan database yang cukup untuk keperluan perencanaan dan penganggaran, serta keakuratan dan ketepatan laporan aset di neraca, keduanya ditingkatkan dengan ketertiban administrasi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tingkat pelaporan keuangan (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh pengawasan (X2). Pelatihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap aset/fungsi BMN diperlukan untuk menjamin penatausahaan pengelolaan BMN yang efisien dan efektif serta kelancaran pelaksanaannya. Tingkat Pelaporan Keuangan (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh Penatausahaan (X1) dan Pengawasan (X2) secara bersamaan. Pihak administrasi memegang peranan penting dalam pengawasan aset Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Larat. Hal ini karena hanya bisa efektif bila didukung oleh data akurat yang diperoleh dari administrasi aset.

REFERENSI

- Aimbu, L. L., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2017). Analisis determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill,"* 8(1).
- Aryani, Y. A., & Gani, M. F. (2023). Penatausahaan Aset Tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi,* 2(2).
- Azhar, I., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset. *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala,* 2(1), 15–26.
- BPPK Kemenkeu. (2015). *Tujuan Dan Arah Pengelolaan Barang Milik Negara.* <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/berita/tujuan-dan-arah-pengelolaan-barang-milik-negara-019438>
- Dewi, W. K., Erniwati, E., & Putri, C. N. (2023). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi,* 5(1), 19–27.
- Ekayanti, S. M., Rifa, A., & Irwan, M. (2018). Determinants effectiveness fixed asset management of District Government on the Island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER),* 9(1), 1219–1229.
- Febrianti, S. (2016). Analisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen,* 10(1), 151–170.

- Firmansyah, A., Wibowo, P., & Puspitarini, I. (2020). The effect of good governance and information technology on the implementation of accrual-based accounting to regional properties. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 1945–1955.
- Fitri, Y., Nurazlina, N., & Al Azhar, A. (2016). *Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Akuntansi, Asimetri Informasi dan Moralitas Individu terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat. Riau University.*
- Garmendia, C., & Kapur, A. (2013). Enhancing Government Property Management with Data and Technology. *M-RCBG Associate Working Paper Series*, 21.
- Gunawan, H., Haming, M., Zakaria, J., & Djamareng, A. (2017). Effect of organizational commitment, competence and good governance on employees performance and quality asset management. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences*, 08(01), 17–30.
- Hidayati, Y., Darmayanti, Y., & Meihendri, M. (2016). Pengaruh Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 8(1).
- Indrawati, N. K. (2019). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Mawuntu, N. S., Manossoh, H., & Afandi, D. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 260–268.
- Nurpadi, D., & Hermawati, M. (2021). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 178–186.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “ Goodwill,”* 8(1).
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141–149.

- Refina, P. (2019). *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Dan Penerapan Simak-Bmn Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Sholehah, A. (2017). *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala*. STIE Indonesia Banjarmasin.